



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUNG DHAMAR SYAKTI**
2. Jabatan : **REKTOR**
3. NHK : **658989**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.209.650.000

1. Tanah Seluas 2919 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 2.189.250.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m2/298 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
3. Tanah Seluas 320 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 272.000.000
4. Tanah Seluas 498 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 398.400.000
5. Tanah Seluas 298 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 87.500.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2006, HASIL SENDIRI
Rp. 80.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SE88 / SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
7.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 43.807.500

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 653.334.677

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 4.994.292.177

III. HUTANG

Rp. 47.883.925

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.946.408.252



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.